



PERAN WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) TERHADAP KERAWANAN PANGAN DI NAMIBIA

Rizky Anggia Putri^{1*}, Falhan Hakiki²

¹Hubungan Internasional; Universitas Gadjah Mada; Indonesia

²Ilmu Pemerintahan; Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Imam Bonjol Padang;
Indonesia

*email: prizkyanggia@gmail.com

Abstract

This research purposed to look at the role of the World Food Program (WFP) as an international organization in responding to the issue of food insecurity in Namibia, based on the vulnerability of food security in Namibia which can have a long-term impact, resulting in intervention from international organizations through WFP. In this research, it was found that WFP plays a role in protecting human rights through the shock responsive social safety nets program, school meals, EP-RBJ-Regional: El Nino preparation for the South African region. Humanitarian assistance role through the zero-hunger program, food security analysis, and providing capacity building to government entities involved in policies and programs related to hunger. The role of WFP can be said to be moving through technical assistance and input programs that have not been able to intervene fully in the policy-making of the Namibian government.

Keywords: *food insecurity; hunger; international organization roles; Namibia; World Food Programme (WFP)*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah melihat peran World Food Programme (WFP) sebagai organisasi internasional dalam merespon isu kerawanan pangan di Namibia, yang didasari adanya kerentanan *food security* di Namibia yang dapat berdampak jangka panjang, sehingga menimbulkan adanya intervensi dari organisasi internasional melalui WFP. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran WFP dalam melindungi hak asasi manusia melalui program *shock responsive social safety nets*, school meals, EP-RBJ-Regional: persiapan El Niño untuk kawasan Selatan Afrika. Peran untuk bantuan kemanusiaan melalui program *zero-hunger*, *food security analysis*, serta memberikan penguatan kapasitas kepada entitas pemerintah yang terlibat dalam kebijakan dan program terkait kelaparan. Peran WFP dapat dikatakan bergerak lewat bantuan teknis dan program masukan yang mana belum dapat mengintervensi secara penuh pengambilan kebijakan pemerintah Namibia.

Kata Kunci: kelaparan; kerawanan pangan; Namibia; peran organisasi internasional; World Food Programme (WFP)

Pendahuluan

Isu *food security* saat ini telah menjadi permasalahan global yang membutuhkan solusi bersama dari negara-negara di dunia. Hal ini berkaitan dengan kerentanan yang ditimbulkan dari isu *food security*, salah satunya adalah kelaparan. Data *Global Hunger Index (2020)* menyatakan bahwa di tahun 2020 sendiri, 31 negara memiliki indeks kelaparan di level serius dan 3 negara berada di level mengkhawatirkan dari total 107 negara di dunia, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 - Index Kelaparan Negara-negara di Dunia Tahun 2020

Serius			Mengkhawatirkan
Eswatini	Mauritania	Korea Utara	Madagaskar
Bangladesh	Togo	Rwanda	Timor Leste
Kamboja	Côte d'Ivoire	Nigeria	Chad
Guatemala	Pakistan	Afghanistan	
Myanmar	Tanzania	Lesotho	
Benin	Burkina Faso	Sierra Leone	
Botswana	Kongo	Liberia	
Malawi	Ethiopia	Mozambik	
Mali	Angola	Haiti	
Venezuela	India		
Kenya	Sudan		

Sumber: Global Hunger Index, 2020.

Namibia adalah salah satu negara di dunia yang sering mengalami kerawanan pangan. Kondisi kerawanan pangan di Namibia dibuktikan dengan kondisi pertanian yang umumnya buruk dan ditandai dengan curah hujan yang tidak menentu serta seringnya banjir dan kekeringan. Namibia sering mengalami kekeringan parah sehingga menyulitkan upaya pemenuhan kebutuhan pangan warganya. Pada tahun 2019, kekeringan berdampak ke lebih dari 257.000 orang dan mengakibatkan kematian 64.000

hewan ternak di seluruh negeri (*World Food Programme*, 2019b: 1-2). Pada sektor keuangan, perkiraan pertumbuhan GDP Namibia sampai akhir tahun 2020 berada di angka -5,9% yang akan menjadi kejatuhan terparah sejak 1990 (*Global Hunger Index*, 2020). Selain itu, sejak tahun 2000-2019 Namibia diklasifikasikan sebagai zona kuning kelaparan serius di dunia (*Global Hunger Index*, 2020).

Saat ini, sejumlah organisasi internasional bergerak di isu *food security* dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerawanan pangan di dunia melalui program-program bantuannya. Beberapa diantaranya adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO), *World Food Program* (WFP), *Heifer International*, dan *Food First*. Pada umumnya, program-program yang dijalankan berupaya untuk menangkal krisis pangan kemanusiaan, mencegah darurat pangan, dan mengelola situasi darurat pangan. Salah satu organisasi internasional yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah *World Food Programme* (WFP). WFP adalah organisasi kemanusiaan di bawah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) dan *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang bertugas memberikan bantuan makanan dalam keadaan darurat dan bekerja dengan masyarakat untuk meningkatkan gizi serta membangun *food security*. Dengan tingkat kelaparan yang tinggi dan kondisi cuaca yang turut memperparah keadaan, Namibia telah menjadi salah satu negara fokus dari program bantuan WFP sejak tahun 1990. WFP hadir sebagai organisasi internasional yang menangani konflik *food security* di Namibia untuk mewujudkan perdamaian bagi masyarakat Namibia (*World Food Programme*, 2021: 13-14).

Hal yang menarik dari isu *food security* di Namibia adalah adanya data prediksi indeks kerentanan terhadap *food security* di tingkat nasional yang menempatkan Namibia pada posisi yang mengkhawatirkan. Data prediksi indeks kerawanan tersebut dapat dilihat pada tangkapan layar website *Met Office Hadley Center & World Food Programme* berikut:



Gambar 1 - Prediksi Indeks Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan

Sumber: *Met Office Hadley Center & World Food Programme, 2020*

Pada tangkapan layar di atas, jika Namibia diletakkan pada skenario emisi gas rumah kaca global yang tinggi, meskipun kemudian diikuti dengan adaptasi level tinggi terhadap perubahan iklim yang terjadi, namun Namibia diprediksi tetap menjadi salah satu negara di benua Afrika dengan nilai indeks kerentanan terhadap *food security* sangat tinggi di dunia pada tahun 2050. Hal ini ditandai dengan warna wilayah Namibia yang kecoklatan menuju merah pada peta di atas dibandingkan wilayah negara lain yang masih memiliki warna cerah, yang artinya kerawanan pangan tidak tinggi. Tingkat keparahan yang diprediksi terjadi akan meningkat sebesar 30% dibandingkan kondisi saat ini, di mana Namibia telah diklasifikasikan masuk dalam zona kuning kelaparan serius di dunia. Hal ini menjadikan Namibia menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan WFP sebagai organisasi internasional yang saat ini tengah berjuang mengupayakan *food security* di Namibia. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran dari *World Food Programme (WFP)* melalui konsep peran organisasi internasional dalam merespon isu kerawanan pangan di Namibia.

Peran Organisasi Internasional

Peranan Organisasi Internasional (OI) dapat dilihat dari beberapa perspektif utama dalam Hubungan Internasional. Dalam tradisi realis, OI tidak menjadi perhatian utama karena OI mencerminkan *balance of power* yang ada dan kepentingan negara-negara

kuat. OI menjadi perhatian utama bagi realis dalam memahaminya sebagai alat dalam perebutan kekuasaan negara, dari pada sebagai aktor independen. Kemudian dari perspektif internasionalis, OI dipandang sebagai ekspresi aturan yang mengatur masyarakat internasional. OI dilihat dari peran mereka, apakah sebagai pembuat aturan, atau hanya mengawasi aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antarnegara. Namun dalam kedua kasus tersebut, OI penting karena mereka mengatur hubungan antarnegara. Selanjutnya dari perspektif universalis, OI sebagai ekspresi dan membentuk masyarakat sipil global daripada sebagai pengatur hubungan antarnegara. Oleh karena itu, OI harus dipelajari sebagai pengganti parsial untuk negara daripada sebagai mediator antarnegara (Barkin, 2006: 8-9).

Hubungan antarnegara beroperasi dalam sistem internasional dan hal tersebut saling berinteraksi sama lainnya. Sebuah peristiwa di suatu negara dapat berdampak pada negara lain. Seperti sebuah peluru yang ditembakkan di Sarajevo dapat memiliki konsekuensi besar bagi mereka yang tinggal di Afrika Selatan, Siberia atau Sydney, dan kegiatan diplomat di New York atau Jenewa mempengaruhi masa depan rezim di Serbia. Dalam sistem ini, hubungan dapat mencakup berbagai kegiatan seperti perjalanan pribadi, perdagangan, bisnis, diplomasi, pertukaran informasi, propaganda, tindakan polisi, dan terorisme (Archer, 2001: 67-68).

Dengan demikian, hubungan antarnegara dalam sebuah sistem di atas, terdapat peran dan fungsi organisasi internasional dalam sistem internasional. Peran ini dapat diidentifikasi dalam bentuk instrumen, arena, dan aktor. Instrumen merupakan cara-cara yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya dalam OI. Ini terjadi di mana negara berdaulat dengan *power* yang dimiliki digunakan untuk membatasi tindakan independen oleh OI. Arena yaitu OI menyediakan tempat pertemuan bagi para anggota untuk berkumpul, berdiskusi, berdebat, bekerja sama, atau saling berlawanan. Aktor adalah anggota-anggota dalam OI dapat bertindak tanpa terpengaruh secara signifikan oleh pengaruh dari luar, yang mana ini dikaitkan dengan aktor tersebut harus independen (Archer, 2001: 68-79).

Dalam sistem internasional yang terdiri atas negara-negara saling berinteraksi satu sama lain, OI memiliki peran lainnya, yaitu peran untuk melindungi hak asasi manusia dan peran untuk menyediakan bantuan kemanusiaan (Barkin, 2006: 80). Peran untuk melindungi hak asasi manusia yaitu organisasi internasional melindungi hak sipil dan

politik, hak buruh, dan hak bahasa daerah dan minoritas. Kemudian melindungi orang-orang dari penyiksaan, perbudakan, perdagangan manusia, diskriminasi rasial, dan penganiayaan terhadap tawanan perang atau warga sipil di bawah pendudukan asing. Ada banyak perjanjian yang dirancang untuk melindungi kategori orang tertentu, seperti perempuan, anak-anak, pengungsi, migran, dan masyarakat adat (Barkin, 2006: 80). Peran organisasi internasional dari segi hak asasi kemanusiaan seperti memantau kepatuhan negara terhadap komitmen perjanjian dan menentukan serta mendefinisikan berbagai kategori hak yang ada pada masyarakat (Barkin, 2006: 87).

Kemudian peran untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. Pada bagian yang jelas dari organisasi dalam sistem PBB yang berfokus terutama pada bantuan kemanusiaan darurat, yang didefinisikan sebagai menyediakan kebutuhan dasar hidup bagi orang-orang yang tiba-tiba menemukan diri mereka sendiri tanpa akses ke makanan dan tempat tinggal. Bantuan kemanusiaan, menurut definisi ini, dapat dibedakan dengan intervensi kemanusiaan, karena selalu melibatkan persetujuan pihak berwenang setempat dan tidak diberikan dengan menggunakan kemampuan militer. Hal ini dapat dibedakan dari bantuan pembangunan karena dirancang untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek, bukan untuk mengembangkan kemampuan dalam jangka panjang (Barkin, 2006: 86-87).

Kedua peran tersebut muncul karena PBB sebagai OI dominan dalam sistem internasional, menetapkan keamanan kolektif sebagai tujuan utama PBB dalam Piagam PBB. Namun, Piagam PBB memberikan peran yang kurang menonjol pada hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan. Meskipun demikian, dari waktu ke waktu baik perlindungan hak asasi manusia dan penyediaan bantuan kemanusiaan telah menjadi peran utama sistem PBB, OI regional, dan LSM internasional (Barkin, 2006: 79).

WFP sebagai OI melakukan tindakan-tindakan dalam menanggulangi kerawanan pangan di Namibia. Dalam penelitian ini, melihat WFP melakukan perannya dalam menanggulangi kerawanan pangan tersebut melalui peran melindungi HAM dan menyediakan bantuan kemanusiaan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif umumnya dimulai dengan asumsi bahwa individu atau aktor lainnya memiliki

peran aktif dalam konstruksi realitas sosial dan diperlukan metode penelitian yang dapat menangkap proses konstruksi sosial tersebut (Boeije, 2010: 6). Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu deskriptif, di mana menawarkan kesempatan bagi peneliti untuk mendeskripsikan subjek studi dengan kata-kata sendiri dan mengerjakannya sebagian besar dengan kondisinya sendiri. Jenis penelitian ini mengungkapkan pandangan, memberikan kata-kata untuk pengalaman peneliti dan menggambarkan peristiwa dan situasi (Boeije, 2010: 32).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen laporan yang berasal langsung dari WFP, *Global Hunger Index*, *Met Office Hadley Center*, dan Pemerintah Namibia. Kemudian data sekunder diambil dari artikel jurnal, buku, laporan, *website* yang berisi informasi mengenai kerawanan pangan di Namibia dan penanggulangannya yang dilakukan oleh WFP. Dari jenis-jenis data yang dikumpulkan, dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data adalah pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk menguji validitas dan reliabilitas data digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan satu data dengan data yang lainnya.

Pada artikel ini, aktor yang memiliki peran aktif dalam deskripsi realitas sosial yaitu WFP yang melakukan perannya di Namibia dalam menangani kerawanan pangan tersebut karena di Namibia karena hal tersebut berdampak kepada kerawanan pangan negara secara jangka panjang. Kemudian penanganan WFP tersebut dideskripsikan dan dianalisis dengan teori peran organisasi internasional yang menghasilkan jawaban atas topik artikel ini mengenai peran WFP dalam menangani kerawanan pangan di Namibia. Proses analisis terdiri dari dua tahapan. Pertama, segmentasi data yaitu membuka, mengurai, memecah, memisahkan, membongkar atau memecah data, dan prosesnya diikuti dengan perakitan kembali data (Boeije, 2010: 77). Segmentasi data ini dilakukan pada data-data yang terkait dalam tema penelitian artikel, yaitu peran WFP dalam isu kerawanan pangan di Namibia. Kedua, *reassembling* data yakni merakit kembali mengacu pada mencari pola, mencari hubungan antara bagian-bagian yang dibedakan, dan menemukan penjelasan untuk apa yang diamati (Boeije, 2010: 76). Tujuan dari *reassembling* adalah untuk memahami data dari perspektif teoritis. Teori atau konsep yang digunakan dalam membantu proses *reassembling* data adalah konsep peran OI berdasarkan peran melindungi HAM dan menyediakan bantuan kemanusiaan.

Pembahasan

Kerawanan Pangan di Namibia

Kondisi wilayah Namibia yang panas dan gersang hingga perubahan iklim, menjadi faktor yang mengakibatkan terjadinya kelaparan dan berdampak terjadinya kerawanan pangan di Namibia. Teramati bahwa pengisian ulang air tanah telah berkurang di Namibia, produktivitas pertanian lahan kering berkurang hingga 50% di wilayah utara-tengah, dan sekitar 20% di wilayah timur laut karena perubahan iklim (Nickanor & Kazembe, 2015: 3). Hal ini memberikan gambaran yang tidak baik bagi sektor pertanian yang merupakan poin penting perekonomian formal dan basis mata pencaharian mayoritas masyarakat di Namibia. Kemudian, berdampak kepada masyarakat Namibia dalam mendapatkan akses makanan menjadi terhambat, sehingga *human security* dari masyarakat Namibia, khususnya aspek *food security* menjadi terganggu.

Di banyak daerah di Namibia, jumlah persediaan pangan yang tersedia di suatu rumah tangga menentukan tingkat akses pangan. Hasil panen rumah tangga menurun karena dampak dari kondisi seperti kekeringan, sehingga sebagian besar mengandalkan pasar untuk bahan pangan. Namun, sumber pendapatan telah berkurang akibat kondisi kekeringan, karena hasil ternak dan penjualan produk ternak merupakan sumber pendapatan utama bagi petani. Meskipun harga komoditas utama tetap stabil, pendapatan rendah dan daya beli membatasi akses rumah tangga ke pangan. Analisis daya beli menunjukkan bahwa 42% rumah tangga di 14 wilayah Namibia membelanjakan lebih dari 50% pendapatannya untuk makanan. Daya beli merupakan faktor pembatas utama akses makanan di Kavango Timur, Kavango Barat, Kunene, Omaheke dan Zambezi. Selain itu, di beberapa daerah, banyak petani dilaporkan bermigrasi ke selatan menuju negara tetangga untuk mendapatkan padang rumput yang lebih baik. Hal ini mengakibatkan berkurangnya produk ternak yang tersedia untuk dijual dan selanjutnya penurunan permintaan tenaga kerja lepas yang menjadi andalan banyak orang miskin untuk mendapatkan penghasilan (Integrated Food Security Phase Classification, 2020: 2).

Penggambaran terganggunya *food security* di Namibia dapat dijelaskan pada kota Caprivi. Pada tahun 2013-2014, produksi tanaman yang buruk berdampak besar bagi rumah tangga yang lebih miskin, sedangkan harga jual yang rendah berdampak besar bagi rumah tangga yang lebih kaya. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin dan jatuh

di bawah ambang batas ketahanan penghidupan mereka. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja di luar pertanian memiliki dampak terbesar pada rumah tangga miskin, karena ini memberikan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka. Hal ini juga menyoroti dampak terkait kondisi cuaca terhadap *food security* rumah tangga. Penurunan serentak dalam produksi tanaman, ternak, dan tenaga kerja pertanian berdampak besar pada perekonomian rumah tangga, dari rumah tangga sangat miskin yang biasanya hidup sangat dekat dengan ambang ketahanan penghidupan, hingga yang lebih kaya. Kondisi cuaca juga akan memiliki efek skala yang lebih besar di tingkat nasional dan internasional, mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan (terutama dengan sebagian besar sereal yang biasanya diimpor ke Namibia) (Young et al., 2020: 10-11).

Selanjutnya pada kota Windhoek, di mana dikutip dari wawancara dengan masyarakat kota tersebut (Pendleton et al., 2014: 200), bahwa ketika masyarakat memiliki sesuatu untuk dimakan, yang kebanyakan adalah *mahangu* atau bubur jagung, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan rasa lapar. Cara hidup masyarakat hanya makan satu sekali sehari dan mereka memiliki prinsip yang terpenting mereka telah makan. Terdapat sebagian kecil masyarakat yang makan lebih satu kali sehari, namun pilihan makanan yang mereka makan sama dan tidak memiliki pilihan lain.

Terganggunya *food security* akibat kerawanan pangan berdampak pada terganggunya *human security* sehingga hal tersebut menjadi permasalahan serius di Namibia. Ini membuat adanya respon dari dunia internasional untuk menanggulangnya. Sebagai organisasi internasional tertinggi, PBB lewat *World Food Programme* datang ke Namibia dalam menanggulangi lewat peran untuk melindungi hak asasi manusia dan menyediakan bantuan kemanusiaan.

Peran *World Food Programme* (WFP) terhadap Isu Kerawanan Pangan di Namibia

Peran untuk Melindungi Hak Asasi Manusia

Shock Responsive Social Safety Nets

WFP menjalankan program *shock responsive social safety nets* dalam wujud proteksi sosial sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat Namibia yang kelaparan, bekerja sama dengan pemerintah Namibia. Melalui hal

tersebut, diharapkan WFP dapat berkontribusi mewujudkan visi yang lebih luas yaitu *SDG's Zero Hunger* di tahun 2030. Perlindungan sosial dapat membantu mengatasi risiko yang dihadapi oleh masyarakat Namibia seperti kemiskinan, pengucilan sosial, ketidaksetaraan dan kerawanan pangan. Perlindungan sosial juga bertujuan melindungi mereka yang paling rentan dari guncangan dan tekanan sepanjang hidup mereka. Dalam menjalankan program ini, WFP menggunakan sistem perlindungan sosial yang biasanya mencakup skema bantuan sosial melingkupi transfer uang tunai, makanan, atau barang lain yang dapat digunakan dan diandalkan pada masa krisis. Selain itu, terdapat juga subsidi dan pembebasan biaya layanan untuk kelompok rentan. Skema bantuan sosial tersebut secara umum dijalankan dengan sistem yang sama di seluruh negara tujuan di dunia termasuk Namibia. Melalui program ini, WFP secara rutin memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Namibia dalam mengelola dan melaksanakan program bantuan darurat, program bantuan pangan perkotaan, termasuk nasihat teknis tentang manajemen rantai pasokan. Contoh bantuan teknis yang diberikan yaitu pembentukan sistem nasional terpadu untuk identifikasi dan pendaftaran penerima bantuan WFP di Namibia. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat di Namibia (*World Food Programme*, 2020).

Pada program ini, WFP mengupayakan perlindungan sosial yang tanggap terhadap guncangan, artinya program dan sistem perlindungan sosial dapat diadaptasi, dipersiapkan dan digunakan untuk mengurangi dampak guncangan yang terjadi. Guncangan yang dimaksud disini dapat diakibatkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik dan migrasi paksa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Namibia. Selain itu, perlindungan sosial juga dapat membangun ketahanan masyarakat dengan mempromosikan kesejahteraan mereka. Melindungi orang dari guncangan dan risiko sendiri merupakan fungsi inheren dari perlindungan sosial (*World Food Programme*, 2020).

WFP (2020) menyebutkan bahwa semua perlindungan sosial dapat membantu orang mengatasi beberapa risiko yang ditimbulkan dari guncangan kehidupan dan dampak yang mereka hadapi selama hidup mereka. Artinya, perlindungan sosial yang diupayakan WFP dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Namibia bahkan pada saat stabil atau tidak terjadi guncangan, sehingga mereka lebih siap menghadapi

guncangan jika itu terjadi dan dapat mendukung mereka yang mengalami kesulitan. Dalam rangka memberikan perlindungan sosial dan membuat sistem yang lebih responsif terhadap guncangan kehidupan mereka seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik, dan migrasi paksa. WFP menjalankan beberapa peran, diantaranya: Pertama, meningkatkan perencanaan dan koordinasi kontingensi untuk seluruh sektor, mempromosikan pengambilan keputusan dini, atau memperkuat hubungan antara manajemen risiko bencana dan aktor perlindungan sosial. Kedua, memperkenalkan program perlindungan sosial permanen yang mengisi kesenjangan, mendukung orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bantuan. Ketiga, menawarkan elemen sistem perlindungan sosial (dapat berupa *database*, alat penilaian, atau bahkan personel) untuk digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam upaya tanggap darurat, terutama jika terjadi bencana yang menyerang dengan cepat. Keempat, membuat program darurat terpisah (dengan kriteria penargetan, nilai transfer, durasi dan/atau personilnya sendiri) yang siaga dan siap dijalankan saat diperlukan. Kelima, merancang metode di mana jumlah variabel pembiayaan akan tersedia untuk mengakomodasi fluktuasi jumlah orang yang membutuhkan bantuan di seluruh sektor perlindungan sosial secara keseluruhan. Keenam, menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk program tanggap darurat yang ada, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih seperti perlindungan sosial (O'Brien, 2020: 7).

Sejak hadir di Namibia, WFP telah memberikan nasihat teknis dan dukungan operasional untuk memperkuat sistem perlindungan sosial pemerintah. Selain itu, pengalaman WFP sendiri dalam memberikan bantuan tunai dan barang, program berbasis sekolah, asuransi dan bantuan makanan untuk aset memungkinkan WFP menjadi mitra pelengkap bagi pemerintah. Dukungan operasional untuk memperkuat sistem perlindungan sosial yang diberikan WFP kepada Pemerintah Namibia termasuk di dalamnya meningkatkan penargetan, menjaga hak dan martabat penerima manfaat dan akuntabilitas yang menjadi hak mereka, mengembangkan platform untuk mendaftar dan mengelola informasi untuk bantuan sosial, menguji coba mekanisme transfer inovatif, membangun jaringan toko terakreditasi di mana orang dapat membelanjakan uang saku mereka, dan mendorong pembelian makanan yang diproduksi secara lokal.

WFP juga memperkuat kapasitas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan sistem perlindungan sosial untuk membangun ketahanan dan menanggapi keadaan

darurat, seperti: bencana atau perpindahan penduduk secara tiba-tiba. WFP semakin banyak menggunakan dan mengembangkan sistem perlindungan sosial milik pemerintah untuk menanggapi keadaan darurat, sehingga menghindari duplikasi upaya dan memperkuat kapasitas sistem nasional yang tanggap terhadap guncangan. Terakhir, WFP juga mendukung pemerintah untuk meningkatkan *food security* dan peningkatan gizi dari sistem perlindungan sosial mereka (*World Food Programme*, 2020).

Peran WFP dalam melindungi hak asasi manusia di Namibia dapat dilihat melalui program *shock responsive social safety nets* yang dijalankannya dalam ruang lingkup perlindungan sosial. Bantuan teknis dan dukungan operasional untuk memperkuat sistem perlindungan sosial pemerintah yang diberikan oleh WFP melalui program *shock responsive social safety nets* merupakan upaya WFP untuk dapat memantau dengan mudah kepatuhan pemerintah Namibia terhadap komitmen menjalankan program yang telah diinisiasi maupun bantuan-bantuan yang telah diberikan. Kepatuhan pemerintah Namibia dimonitor oleh WFP melalui laporan-laporan evaluasi yang dikeluarkan baik oleh WFP sebagai pihak pemberi bantuan maupun Pemerintah Namibia sebagai pihak penerima bantuan. Laporan-laporan yang dikeluarkan WFP bervariasi dari yang berskala global maupun spesifik kepada Namibia di mana setiap perkembangan yang dilaporkan menjadi tolak ukur keberhasilan program yang dijalankan. Contoh laporan skala global dan domestik yang juga mencakup program *shock responsive social safety nets* di Namibia yaitu:

Tabel 2 - Laporan Skala Global dan Domestik WFP Terkait Program *Shock Responsive Social Safety Nets*

Laporan Skala Global	Laporan Skala Domestik
<i>Emergency Food Security Assessment Handbook (EFSA)-Second Edition, 2009</i>	<i>Factsheet: WFP Strategy in Namibia (2012-2016)</i>
<i>FAO/WFP Joint Guidelines for Crop and Food Security Assessment Missions (CFSAMs), 2009</i>	<i>Leveraging Strategic Partnerships for Zero Hunger in Namibia</i>
<i>Food Security Monitoring Systems (FSMS)-Technical Guidance Sheet</i>	<i>Strengthening Food and Nutrition Security Analysis in Namibia</i>
<i>Southern Africa-Food and Nutrition Security Working Group, 2014,2015, 2016, 2017</i>	<i>Monitoring Evolving Food Security Situations in Namibia</i>
<i>Factsheet - Food Security Analysis, 2015</i>	<i>Country Brief Namibia</i>

<i>Revolutionizing Data Collection-World Food Programme and Nielsen Use Scalable Mobile Surveys in Today's Changing Technological Landscape, 2015</i>	<i>Namibia-Food and Nutrition Security Monitoring, 2014</i>
<i>El Niño-Implications and Scenarios for 2015, 2015/2016, 2016/2017</i>	
<i>UNHCR/WFP Joint Assessment Missions (JAM) Guidelines</i>	
<i>Gender-Guidelines: Gender and Food Security Analysis</i>	
<i>The Assessor-Food Security Analysis Newsletter</i>	
<i>El Niño: Undermining Resilience-Implications of El Niño in Southern Africa from a Food and Nutrition Security Perspective, 2016</i>	
<i>Evaluation of the WFP Policy on Capacity Development (2009); Food Consumption Score Nutritional Quality Analysis (FCS-N)-Technical Guidance Note</i>	
<i>Consolidated Approach to Reporting Indicators of Food Security (CARI) Guidelines</i>	
<i>Global Food Security Update; Review of mVAM programme: novel application of mobile technologies for food security monitoring, 2015;</i>	
<i>Market Analysis Guidelines</i>	
<i>Collecting Prices for Food Security Programming: The how and why of price data collection at WFP, 2017</i>	
<i>Conducting Mobile Surveys Responsibly: A Field Book for WFP Staff, 2017</i>	
<i>Technical Guidance for the Joint Approach to Nutrition and Food Security Assessment (JANFSA)</i>	
<i>2018 Global Report on Food Crises; Southern Africa - 2017-2018 Seasonal Update #3, 2018</i>	
<i>UNHCR WFP Joint Principles for Targeting Assistance to Meet Food and Other Basic Needs to Persons of Concern</i>	
<i>The 72-hour Assessment Approach: A guide for vulnerability and spatial analysis in sudden-onset disasters, 2018</i>	
<i>Strategic Evaluation of the Pilot Country Strategic Plans; Southern Africa-Monthly Food Price Update, 2018, 2019</i>	
<i>Southern Africa - Informal Cross Border Trade, 2019</i>	
<i>Seasonal Monitor; dan The Market Monitor</i>	

Sumber: World Food Programme, n.d.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa laporan skala domestik berjumlah lebih sedikit dibandingkan laporan skala global. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa program *shock responsive social safety nets* di Namibia tidak memenuhi standar

global. Hal ini dikarenakan dari semua laporan skala global yang ditampilkan di atas, seluruhnya tetap memuat pembahasan mengenai program *shock responsive* di Namibia. Oleh karena itu, kesenjangan jumlah laporan skala global dan domestik tidak merepresentasikan kegagalan program *shock responsive social safety nets* di Namibia. Justru, laporan-laporan ini digunakan oleh WFP untuk memantau sekaligus mengevaluasi perkembangan program dan bantuan perlindungan sosial yang WFP berikan kepada pemerintah Namibia.

Selain itu, peran WFP dalam pembuatan sistem nasional terpadu untuk identifikasi dan pendaftaran penerima bantuan untuk menghindari kemungkinan kesenjangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya WFP dalam menentukan serta mendefinisikan berbagai kategori hak yang ada pada masyarakat Namibia, sesuai dengan pernyataan Barkin (2006) mengenai peran Organisasi Internasional. Pemaparan di atas telah memberikan penjelasan mengenai peran WFP dalam perlindungan hak asasi manusia di Namibia, khususnya melalui program *shock responsive social safety nets*. Dalam hal ini, WFP berupaya menjamin hak masyarakat Namibia untuk memiliki kehidupan yang layak ketika ada guncangan seperti: bencana alam seperti kekeringan yang sering melanda Namibia maupun bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di masa mendatang, krisis ekonomi yang diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi, dan hal lainnya. Selain itu, WFP juga berupaya menjamin hak masyarakat Namibia untuk memiliki kehidupan yang layak ketika kondisi sedang stabil.

Program *School Meals*

School meals merupakan program yang diinisiasi oleh WFP yaitu berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas program makanan di sekolah, termasuk pengembangan kebijakan pemberian makan di sekolah, pedoman pelaksanaan, rencana pemantauan dan dukungan teknis pada sistem informasi berbasis *web*. Program ini ditargetkan untuk siswa sekolah dasar yang yatim piatu atau anak-anak yang rentan dan membutuhkan makan karena alasan ekonomi atau sosial, terutama yang secara geografis berada di daerah rawan kekeringan, daerah penghasil tanaman rendah, termasuk lembaga asrama swasta, sekolah dasar, dan daerah miskin (*World Food Programme*, 2020).

WFP berperan dalam memberikan dukungan yang berfokus pada penguatan kapasitas lembaga pemerintah untuk mencapai *food security* dan gizi bagi populasi yang rentan melalui program nasional *school meals*. Selain itu, WFP juga memberikan dukungan berupa pelatihan, pelaksanaan program, pemantauan, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mempersiapkan Kementerian Pendidikan Namibia dalam menjalankan program ini. Dengan partisipasi masyarakat yang kuat, program tersebut telah berhasil meningkatkan kehadiran siswa dan membuat siswa lebih berkonsentrasi di sekolah. WFP juga memberikan panduan asupan gizi yang direkomendasikan harian untuk usia sekolah yang dapat dijadikan standar bagi Namibia dalam pelaksanaan program *school feeding* maupun negara-negara lainnya yang melaksanakan program serupa, seperti tabel 3 berikut:

Tabel 3 - Rekomendasi Asupan Gizi Harian Usia Sekolah WFP

<i>Komponen</i>	<i>Estimasi Asupan Gizi Harian (AGH) yang direkomendasikan untuk anak usia sekolah</i>	<i>Kontribusi yang direkomendasikan dari jatah sekolah (kontribusi minimal setengah hari sekolah 30% dari AGH)</i>
Energi	1850 kkal - 7740 kJ	555 kkal - 2323 kJ
Protein	46 gram	13,8 gram
Lemak	35 gram	10,5 gram
Yodium	120 μ g	36 μ g
Vitamin A	500 μ g	150 μ g
Zat Besi	17,8 mg	5,3 mg
Zink	11,2 mg	3,36 mg
Kalsium	700 mg	210 mg

Sumber: *Namibia Ministry of Education & World Food Programme, 2012*

Namibian School Feeding Programme (NSFP) telah menjadi bagian integral dari strategi pemerintah Namibia untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memperluas akses terhadap peluang pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung, terutama anak yatim piatu dan pelajar sekolah yang rentan. Di tahun 2010, 1.183 sekolah mendapat manfaat dari program ini dengan total siswa 224.957. Di tahun 2011, terdapat 270.772 dari total 607.627 siswa yang telah mendapatkan manfaat dari program ini dari 1.293 sekolah di mana 86% sekolah dasar dan gabungan berpartisipasi dalam NSFP. Di

tahun 2012, Pemerintah Namibia kembali mengundang WFP untuk memberikan bantuan teknis guna mendukung upaya peningkatan operasional serta dampak dari pelaksanaan NSFP secara keseluruhan. Sebagai tindakan lanjutan, Pemerintah Namibia dan WFP menandatangani tiga perjanjian kerja sama yang meliputi tiga periode pelaksanaan program kerja sama, yaitu: pertama, untuk periode 2012-2015; yang kedua untuk periode 2015-2018; dan yang ketiga untuk periode 2018-2022. Kerja sama ini memberikan ruang lebih bagi WFP yang mana untuk pertama kalinya NSFP di evaluasi secara sistematis (*Namibia Ministry of Education & World Food Programme*, 2012: 11).

WFP juga menyediakan rujukan untuk menilai kemajuan selama periode evaluasi serta dasar analisis biaya yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi Pemerintah Namibia. Rujukan ini juga berfungsi untuk memantau dengan mudah kepatuhan pemerintah Namibia terhadap komitmen menjalankan program *school meals* yang telah diinisiasi maupun bantuan-bantuan yang telah diberikan. Untuk tahun 2012, terdapat total 1.000 kantong makanan yang dibagikan ke seluruh sekolah yang terdaftar dalam program NSFP dengan total siswa yang terdaftar sebanyak 216.030. Di tahun 2013, terdapat total 4.598 kantong makanan yang dibagikan dengan total siswa yang terdaftar sebanyak 243.007. Di tahun 2014, terdapat total 206.610 kantong makanan yang dibagikan dari total 256.783 siswa yang terdaftar. Di tahun 2015, terdapat total 163.963 kantong makanan yang dibagikan dari total 243.881 siswa yang terdaftar. Di tahun 2016, terdapat total 170.669 kantong makanan yang dibagikan dari total 231.126 siswa yang terdaftar. Di tahun 2017, terdapat total 99.442 kantong makanan yang dibagikan dari total 336.006 siswa yang terdaftar. Di tahun 2018, terdapat total 78.556 kantong makanan yang dibagikan dari total 215.343 siswa yang terdaftar (Land et al., 2020: 16). WFP juga mempublikasi laporan-laporan evaluasi lainnya terkait program *school meals* di Namibia yaitu: *Namibia, National School Feeding Programme (2012-2018): Evaluation; The Transition of the School Feeding Programme in Namibia; Enhancing School Feeding Monitoring in Namibia; dan Strengthening Namibia's School Feeding Programme*.

Program *school feeding* merupakan bagian penting dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh WFP yang diperlukan untuk mengatasi faktor kelaparan yang menjadi salah satu penentu kehadiran siswa di sekolah. Melalui program ini, upaya

untuk memberikan hak bagi setiap anak Namibia atas pendidikan dapat terpenuhi. Keberhasilan program ini disebutkan oleh WFP dapat dilihat dalam lima aspek. Pertama, berkaitan dengan akses terhadap pendidikan, di mana program ini telah berkontribusi meningkatkan angka pelajar sekolah dasar dari tahun 2011 sebanyak 408.804 menjadi sebanyak 518.103 di tahun 2017. Kedua, berkaitan dengan siklus lengkap pendidikan dasar, di mana tingkat putus sekolah cenderung menurun untuk semua kelas di sekolah dasar selama periode 2011-2017 dengan sedikit peningkatan di tahun 2015. Ketiga, berkaitan dengan kehadiran siswa secara reguler, di mana disebutkan bahwa tingkat kehadiran per semester menjadi 80% atau lebih tinggi untuk semua siswa pada tahun 2017. Keempat, berkaitan dengan semua peserta didik yang terdaftar lulus dan menyelesaikan berbagai tingkatan di pendidikan dasar. Kelima, berkaitan dengan asupan kalori (kuantitas dan RDI) oleh anak menurut jenis kelamin per hari di sekolah. Dari sampel survei sekolah, 83% kepala sekolah melaporkan bahwa lebih dari 80% peserta didik yang terdaftar untuk mengikuti program menerima makanan mereka meskipun tidak penuh selama 200 hari program (Land et al., 2020: 21-25). Kontribusi yang telah diberikan program ini kepada pelajar di Namibia merupakan upaya WFP untuk perwujudan Piagam PBB khususnya yang menegaskan keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental, yaitu pada persamaan hak laki-laki dan perempuan di Namibia dalam memperoleh kesetaraan dan memperluas akses terhadap peluang pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung, terutama anak yatim piatu dan pelajar sekolah yang rentan. Hal ini menunjukkan peran WFP dalam mempromosikan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih besar.

EP-RBJ-Regional: Persiapan El Niño untuk Kawasan Selatan Afrika

WFP membuat program yang mengalokasikan dana sebesar \$ 285.288 untuk mendukung kegiatan kesiapsiagaan khusus di kawasan selatan Afrika untuk menangani Kesiapan *El Niño* Regional, termasuk salah satunya Namibia. Program ini direncanakan dijalankan selama durasi tiga bulan dari 9 November 2015 - 8 Februari 2016 (World Food Programme, 2016: 2). Namun demikian, program ini pada praktiknya berjalan dari 9 Januari 2016-8 Februari 2016. Program ini berawal dari prediksi *The Southern Africa Regional Climate Outlook Forum* (SARCOF) bahwa besar kemungkinan akan terjadi

musim *El Niño* untuk musim tanam di tahun 2015/2016. Kondisi ini diperparah dengan musim pertanian yang buruk pada 2014-2015 yang mengakibatkan situasi defisit pangan di negara-negara kawasan. Peristiwa *El Niño* yang secara resmi dideklarasikan pada bulan Maret 2015 diperkirakan akan tetap aktif dan mencapai puncaknya dari triwulan terakhir tahun 2015 hingga triwulan pertama tahun 2016 yang bertepatan dengan puncak musim tanam khususnya di wilayah Namibia dan diperkirakan menjadi salah satu *El Niño* yang terkuat selama 35 tahun terakhir. Hal ini akan berakibat buruk pada produksi tanaman dan berisiko menyebabkan defisit pangan, berpotensi dibarengi dengan depresiasi mata uang lokal, yang berkontribusi pada kenaikan harga yang tidak normal. Hal ini membuat Namibia dan negara lainnya di kawasan Selatan-Selatan kemungkinan besar akan menghadapi tantangan *food security* yang sangat serius di musim paceklik di tahun tersebut dan panen tahun depannya. Oleh karena itu, melalui program ini WFP memiliki tujuan untuk mengurangi risiko dan memungkinkan orang, komunitas, dan negara memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mereka sendiri. Pada akhir 2015, curah hujan yang dipengaruhi *El Niño* menyebabkan kondisi lebih kering dari rata-rata yang mempengaruhi periode paling kritis dari musim tanam, produksi sereal dan tanaman lain terpengaruh kearah negatif. Akibat kondisi *El Niño*, awal musim tanam menjadi tidak menentu dan dalam banyak kasus musim tanam menjadi tertunda di sebagian besar Afrika bagian selatan (*World Food Programme*, 2016: 3).

Program yang dijalankan di delapan negara lainnya di selatan Afrika ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan pertama, yaitu Pemantauan Harga Komoditas yang ditingkatkan menggunakan Platform MVAM. Kegiatan kedua, yaitu “Pemantauan lintas batas Sereal/Jagung (informal dan formal)”. Kegiatan ini memprioritaskan pemantauan arus komoditas informal melalui titik-titik perbatasan utama untuk mengumpulkan informasi penting mengenai tingkat stok jagung serta arus perdagangan. WFP bekerja sama dengan *Famine Early Warning Network System* (FEWSNET) untuk memberikan dukungan teknis kepada *Alliance for Commodity Trade in East and Southern Africa* (ACTESA) untuk kegiatan pengumpulan, analisis, dan penyebaran data perbatasan tepat pada waktunya. Kegiatan ketiga, yaitu “Manajemen Informasi dan Pemetaan Bahaya di Negara Terpilih”. Analisis tersebut menyimpulkan bahwa sekitar 40,6 juta orang kemungkinan besar berisiko karena kekeringan. Puncak penelitian ini adalah penerbitan laporan mendalam berjudul, “Implikasi *El Niño* di selatan Afrika dari

Perspektif *food security* dan Gizi,” yang diterbitkan pada Februari 2016. Laporan ini pertama kali diterbitkan sebagai sumber referensi utama di kawasan Selatan. Selain analisis bahaya, penelitian mencakup profil spesifik negara yang merinci gambaran umum makro-ekonomi, tren *food security* dan gizi, kesiapsiagaan pemerintah, dan program perlindungan sosial. Kegiatan keempat, yaitu “Pengembangan Penilaian Kapasitas Rantai Pasokan Regional” yang bertujuan untuk menugaskan tim gabungan ahli rantai pasokan untuk melakukan penilaian kapasitas rantai pasokan regional yang diperbarui untuk mengidentifikasi kemacetan, mengusulkan solusi, dan merekomendasikan tindakan tindak lanjut. Kegiatan kelima, yaitu “Kesiapan Komoro”. Meskipun tidak ada Kantor Perwakilan WFP di Komoro, *Regional Bureau Johannesburg’s* (RBJ) memainkan peran pendukung dalam keadaan darurat, dengan kantor perwakilan Madagaskar ditunjuk sebagai pengawas. Mengingat meningkatnya risiko angin topan yang sering mempengaruhi pulau dan sebagai bagian dari tindakan kesiapsiagaan RBJ, misi ke Komoro untuk menilai tingkat kesiapsiagaan pemerintah dan meluncurkan area darurat di Pulau Anjoan dilakukan. Keenam, “Dukungan Regional untuk Tindakan Kesiapsiagaan di Negara RBJ lainnya” yaitu dukungan kesiapsiagaan darurat menyeluruh dengan menargetkan negara-negara prioritas termasuk Lesotho, Namibia, dan Swaziland (*World Food Programme*, 2016: 4-6).

Melalui program EP-RBJ-Regional Persiapan *El Niño* untuk Kawasan Selatan Afrika, WFP melakukan analisis bahaya di seluruh wilayah selatan Afrika termasuk Namibia untuk menentukan populasi potensial yang berisiko terkena *El Niño*. Hal ini dilakukan dengan meninjau data historis selama 30 tahun untuk menentukan area yang pernah terkena dampak di masa lalu dan kemungkinan akan terpengaruh lagi pada tahun 2016. Melalui program ini, WFP telah berupaya untuk menjamin hak masyarakat Namibia untuk memperoleh kehidupan yang layak dan untuk meningkatkan kualitas hidup baik dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi *El Niño* agar masyarakat dan pemerintah Namibia dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mereka sendiri.

Peran Bantuan Kemanusiaan

Membentuk Program *Zero Hunger*

Zero Hunger adalah seruan aksi multi-level dan multi-sektoral internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuju visi dunia tanpa kelaparan. Ini

menyatukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat negara untuk berkontribusi dalam menanggulangi kerawanan pangan. *Zero Hunger* berada di pusat Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang telah diadopsi oleh pemerintah Namibia. Tujuan *Sustainable Development Goal 2* (SDG2) menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk “mengakhiri kelaparan, mencapai *food security* dan meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan” (Republic of Namibia, 2017: 1).

Zero hunger disusun berdasarkan lima pilar di mana pengimplementasiannya di Namibia. Pada Pilar I, WFP memberikan bantuan teknis terkait pengambilan kebijakan pemerintah Namibia untuk berfokus secara eksplisit membantu memastikan bahwa makanan terjangkau dan bisa memenuhi akses 100% sepanjang tahun. Seperti *Namibia Trade Forum* (NTF) yang berfungsi mengumpulkan dan memantau harga di industri atas nama Kementerian Industrialisasi, Perdagangan dan Pengembangan UKM. Forum tersebut mengerjakan perumusan Piagam Ritel, yang akan mencakup undang-undang yang melindungi konsumen. Piagam ini bertujuan untuk memfasilitasi “pertumbuhan di dalam negeri”, sehingga memastikan bahwa produsen lokal terlindungi dari persaingan tidak sehat dari produk impor. Melalui Dewan Agronomi Namibia, negara tersebut ditutup untuk impor biji-bijian selama periode tertentu dalam setahun untuk memungkinkan produksi lokal dikonsumsi di pasar (Republic of Namibia, 2017: 26).

Pilar II: tidak ada anak yang *stunting* kurang dari dua tahun. WFP bersama pemerintahan Namibia melakukan bantuan kemanusiaan lewat intervensi khusus terhadap nutrisi mencakup banyak suplementasi mikronutrien dan inisiatif pemberian makanan bayi dan anak. Pemerintah Namibia kemudian memperbarui kebijakan *food security* dan gizi serta rencana implementasi yang mengkonsolidasikan strategi khusus gizi termasuk fortifikasi pangan secara wajib. Selain itu, ada program suplementasi vitamin A di seluruh negeri yang menargetkan anak usia 6-59 bulan dan wanita yang baru melahirkan. Hal ini berdampak kepada proporsi anak yang menerima suplemen mikronutrien telah meningkat sejak survei demografi dan kesehatan Namibia 2006-2007 dari 52% menjadi 84% pada 2015. Dalam hal mengatasi kekurangan yodium, WFP lewat pemerintah Namibia meluncurkan kampanye suplementasi yodium dan mengesahkan undang-undang tentang wajib iodisasi garam rumah tangga. Suplementasi zat besi selama 90 hari atau lebih selama kehamilan masih dipromosikan dan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi (Republic of Namibia, 2017: 29).

Selanjutnya pada Pilar III: semua sistem pangan berkelanjutan. Untuk membangun ketahanan masyarakat yang terkena dampak kekeringan, dan sistem pangan Namibia secara lebih umum, Kementerian Pertanian, Air, dan Kehutanan Namibia bersama WFP memulai sejumlah inisiatif, yang berkisar dari pengembangan tanaman tahan kekeringan dan varietas ternak, seperti varietas *millet* mutiara *Okashana* yang matang lebih awal dan *Nguni*. Selain itu, teknik mutasi pembiakan telah digunakan untuk mengembangkan varietas kacang unggul yang tahan terhadap kekeringan dan serangga. Selanjutnya, Kementerian sedang dalam proses melaksanakan Program Skema Hijau dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman di bawah irigasi untuk melingkupi produksi tanaman di bawah kondisi tadah hujan. Ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan impor pangan saat ini (Republic of Namibia, 2017: 31).

Kemudian Pilar IV: meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani kecil 100%. Namibia memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil melalui peningkatan adopsi teknologi baru tambahan, intensifikasi mekanisasi, dan lingkungan kebijakan yang dicirikan oleh koordinasi lintas dan dalam sektor, serta pemantauan dan evaluasi proyek dan program yang efektif. Ini akan memungkinkan petani kecil mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan lahan yang sebelumnya marjinal. Selain itu, WFP dan pemerintah Namibia lewat beberapa strategi agar petani meningkatkan pendapatannya, yaitu petani didorong menghasilkan jagung dan petani komunal di utara menghasilkan *mahangu* (*millet* mutiara) yang tahan kekeringan di mana merupakan bagian penting dari makanan nasional (Republic of Namibia, 2017: 33).

Terakhir Pilar V: tidak ada kehilangan atau pemborosan makanan. WFP bersama Agro-Marketing Trade Agency (AMTA) mendirikan silo di wilayah utara yaitu di Omusati, Kavango, dan Zambezi untuk menyediakan Cadangan Pangan Strategis Nasional di mana mempunyai penyimpanan lebih dari 15.000 metrik ton untuk mengurangi kehilangan makanan dengan menyediakan fasilitas penyimpanan yang layak dan memadai bagi petani. Selanjutnya WFP dan pemerintah Namibia mendirikan inisiatif Bank Makanan pada tahun 2012 sebagai tanggapan atas protes sekitar ratusan orang yang mengambil makanan di tempat pembuangan sampah Kupferberg di Windhoek. Meskipun belum ditingkatkan, inisiatif ini berfokus pada meminta dan mengemas makanan, pakaian, bahan pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk

orang-orang yang rentan daripada membiarkan bahan tersebut dibuang dan memberikan pendekatan yang terorganisir untuk distribusi dan pengumpulan makanan (Republic of Namibia, 2017: 36).

Kelima pilar dalam program ini juga sebagai bentuk bantuan kemanusiaan WFP terhadap isu kerawanan pangan di Namibia, di mana masyarakat Namibia tidak dapat menyediakan kebutuhan dasarnya, yaitu akses terhadap makanan. Hal ini berkaitan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia yaitu masyarakat dapat secara bebas mengakses makanan untuk pembangunan kelangsungan hidup mereka, baik itu laki-laki dan perempuan, maupun dari negara-negara manapun.

Food Security Analysis

WFP membantu Pemerintah Namibia untuk memperkuat basis bukti *food security* negara melalui program ini untuk menginformasikan dialog kebijakan dan rancangan dalam mengatasi kelaparan. Sistem Pemantauan *Food Security* dan Gizi merupakan salah satu program dari *food security analysis* yang dikembangkan dengan dukungan WFP untuk mengumpulkan informasi tentang konsumsi pangan rumah tangga individu, pendapatan mereka, dan strategi yang mereka kembangkan untuk mengatasi situasi sulit untuk memungkinkan mekanisme respons yang tepat. Program ini didasarkan pada pendekatan pemangku kepentingan banyak yang mengintegrasikan indikator *food security* seperti kesehatan, peternakan, produksi tanaman, dan lain-lain untuk memberikan gambaran *food security* yang komprehensif (World Food Programme, n.d.: 3).

Tujuan program ini untuk membangun kapasitas teknis dalam struktur pemerintah Namibia agar dapat secara efektif mengkoordinasikan sistem yang ada, menyelaraskan analisis data dan menghasilkan produk informasi yang akan digunakan untuk deteksi dini / peringatan perubahan kondisi *food security*, serta untuk pengambilan keputusan dan intervensi tepat waktu. Program ini juga membantu mendeteksi dan melacak perubahan dalam situasi *food security* masyarakat seiring waktu & ruang; dan memberitahu Pemerintah Namibia ketika situasi memburuk untuk memastikan bahwa bantuan dapat diberikan dengan cara dan waktu yang tepat (World Food Programme, n.d.: 3).

Beberapa contoh *food security analysis* lewat Sistem Pemantauan *Food Security* dan Gizi yang dilakukan oleh WFP untuk memberikan gambaran analisis situasi yang terjadi di Namibia. Pada hasil analisis yang dilakukan oleh WFP pada November 2014, ditemukan peningkatan panen yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi *food security* rumah tangga kemungkinan besar akan tetap stabil hingga puncak periode kelaparan (Desember hingga Maret) ketika stok makanan diperkirakan akan habis. Prediksi untuk fenomena cuaca *El Niño* yang muncul adalah bahwa cuaca akan ringan. Namun, dampak keseluruhannya tetap tidak dapat diprediksi. Kemudian WFP memberikan rekomendasi terkait hasil analisis seperti pemantauan musim hujan perlu terus diawasi mengingat latar belakang *El Niño* yang lemah di Samudera Pasifik. Meskipun *El Niño* dianggap ringan, dampak keseluruhannya tetap tidak dapat diprediksi. Banjir perlu dipantau secara ketat untuk daerah yang diperkirakan akan menerima hujan normal sampai di atas normal, terutama daerah dataran rendah di daerah Tengah Utara (*World Food Programme & Namibia Office of the Prime Minister*, 2014: 10).

Bantuan *food security analysis* merupakan bantuan kemanusiaan yang dijalankan WFP yang bersifat teknis, bertujuan agar Pemerintah Namibia bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk terjadinya kelaparan yang mengakibatkan kerawanan pangan di Namibia, seperti perubahan cuaca atau iklim. *Food security analysis* yang dijalankan WFP berguna untuk pengambilan kebijakan Pemerintah Namibia dalam mitigasi untuk mengurangi kerentanan pangan yang ditimbulkan, yang mana peran ini salah satu bagian dari sekuritisasi pangan yang bersifat teknis dijalankan oleh WFP.

Memberikan Penguatan Kapasitas kepada Entitas Pemerintah yang Terlibat dalam Kebijakan dan Program terkait Kelaparan

Meningkatnya efek perubahan iklim di Namibia secara signifikan mempengaruhi *food security* dan gizi. Hal ini membuat upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim menjadi sangat penting mengingat adanya konsekuensi akibat dari kerusakan lingkungan, yang mana kerusakan di satu area dapat berdampak terhadap komunitas yang tinggal di area tersebut atau bahkan dapat menyebabkan bencana global (Lassa, 2010: 22). Atas permintaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pariwisata, WFP

memberikan dukungan melalui studi perubahan iklim dengan menyediakan data yang diperlukan untuk peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respon. Analisis tersebut didasarkan pada catatan jangka menengah (1981–2018) curah hujan, vegetasi dan suhu. Temuan dari studi digunakan untuk menginformasikan penilaian kerentanan, yang dilakukan untuk menentukan kemajuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal ini diinformasikan dari Komunikasi Nasional Keempat untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, yang memberikan informasi terbaru tentang upaya negara untuk mengatasi perubahan iklim dan pengaruhnya, termasuk penilaian kerentanan mereka yang bergantung pada iklim sensitif seperti sektor pertanian (*World Food Programme*, 2019a: 10).

Selain itu, temuan dari studi tersebut memberikan informasi tentang penggerak iklim yang mempengaruhi kerawanan pangan. Menggunakan analisis, catatan konsep dengan rekomendasi tentang bagaimana memperkuat sistem peringatan dini terkait perubahan iklim Namibia, dikembangkan dan disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Catatan konsep menguraikan kegiatan dan sistem yang akan dikembangkan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa informasi terkait iklim disampaikan secara tepat waktu dan akurat kepada petani. Hal ini juga memberikan rekomendasi kepada Kantor Perdana Menteri Namibia tentang mitigasi bencana yang disebabkan iklim. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, WFP mengajukan proposal ke berbagai donor untuk pendanaan pelaksanaan program (*World Food Programme*, 2019a: 10).

WFP memberikan dukungan teknis untuk pengembangan perangkat pemantauan dan evaluasi dari Departemen Manajemen Risiko Bencana dan alat pelaporan. Rencana tersebut mencerminkan keselarasan strategi Pemerintah Namibia dengan *Fifth National Development Plan* (NDP5) dan Kerangka Kerja Sendai. NDP5 menguraikan prioritas Namibia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, politik, dan sosial warganya selama lima tahun. Kerangka kerja global PBB Sendai bertujuan untuk mencapai pengurangan risiko bencana yang substansial, kematian, dan mata pencaharian yang terganggu di tahun-tahun mendatang (*World Food Programme*, 2019a: 11).

Selama tahun 2017-2019, WFP mendukung pengembangan Strategi Komunikasi Bencana, sebuah strategi nasional tentang bagaimana informasi bencana harus disampaikan. Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi terus menggunakannya untuk memandu kegiatan advokasi, termasuk yang dilakukan oleh

Komite Penilaian Kerentanan Namibia. WFP memberikan masukan teknis untuk kerangka ketahanan Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan, yang akan menjadi dasar untuk pengembangan strategi ketahanan nasional Namibia (*World Food Programme*, 2019a: 11).

Kemudian Pemerintah Namibia meminta WFP untuk memberikan dukungan teknis dan koordinasi dalam mengembangkan pedoman profil risiko tentang kemungkinan bencana alam dan dampak terkaitnya. Pedoman ini kemudian disusun dalam dokumen “*Crisis Response Revision of Namibia Country Strategic Plan (2017–2022) and corresponding budget increase*” dan “*Namibia Annual Country Report 2020: Country Strategic Plan 2017 – 2022*”. Pedoman ini memberikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembangkan profil risiko regional dan nasional. Setelah didukung oleh Pemerintah Namibia, pedoman ini berfungsi sebagai sumber manajemen risiko bencana yang dapat digunakan oleh pemerintah dan mitra pembangunan untuk merencanakan, menanggapi, dan memitigasi kemungkinan dampak bencana dan dampak perubahan iklim. Selanjutnya, dialog pertama tentang pengembangan strategi ketahanan nasional diadakan di bawah kepemimpinan WFP dan mengarah pada pemetaan intervensi ketahanan di seluruh negeri (*World Food Programme*, 2019a: 11).

Simpulan

Kelaparan yang mengakibatkan kerawanan pangan melanda Namibia telah berimplikasi buruk secara jangka panjang telah membuat WFP memberikan upaya bantuan dalam menangani kasus tersebut. Melalui program bantuannya, WFP telah berkontribusi mengurangi angka kelaparan dan membantu upaya penyelesaian isu kerawanan pangan di Namibia. Pada perannya sebagai OI dalam melindungi HAM dan bantuan kemanusiaan, WFP dapat dikatakan menjalankan perannya dengan baik karena dari masing-masing ketiga program mereka berhasil diimplementasikan.

Peran WFP dalam menangani isu kerawanan pangan masih terdapat limitasi karena hanya bantuan teknis dan program-program masukan yang dibentuk namun belum sepenuhnya dapat mengintervensi secara keseluruhan dari kebijakan Namibia. Ini terkait dengan kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkait dengan pembuatan dan pengambilan kebijakan sehingga peran OI dalam menangani suatu kasus sepenuhnya belum optimal. Negara menganggap ketika OI bisa mengintervensi secara penuh

kebijakan sebuah negara, itu dapat berdampak kepada stabilitas kedaulatan negara. Artinya, negara berhak mengatur segala urusan internal dalam negerinya tanpa campur dari pihak-pihak luar. Untuk itu, saran dan harapan peneliti adalah dilakukannya penelitian-penelitian lanjutan mengenai bagaimana upaya yang lebih maksimal yang seharusnya dilakukan oleh OI, yang kedepannya dapat mengintervensi kebijakan negara berdaulat sehingga target-target di tingkat internasional dapat diterapkan di tingkat nasional sebuah negara.

Daftar Pustaka

- Archer, C. (2001). *International Organizations*. Psychology Press.
- Barkin, S. J. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. Palgrave Macmillan.
- Boeije, H. (2010). *Analysis in Qualitative Research* (1st ed.). Sage Publications Ltd.
- Fabrian, D. T. (2015). A Nationalist Human Resource as a Vital Asset for Indonesia's Development. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 17(1), 81–95. <https://doi.org/10.7454/global.v17i1.27>
- Global Hunger Index. (2020). *Namibia*. <https://www.globalhungerindex.org/namibia.html>.
- Global Hunger Index. (2020). *Global Hunger Index: One Decade to Zero Hunger Linking Health and Sustainable Food Systems*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/synopsis.pdf>
- Integrated Food Security Phase Classification. (2020). *Republic of Namibia Prolonged Drought in Namibia Drives Over 400,000 People into Food Crisis*.
- Land, T., Kariuki, W., Neri, M., & Otieno, O. (2020). *Decentralized Evaluation: Evaluation of Namibia National School Feeding Programme 2012-2018 (Volume I)*.
- Lassa, J. (2010). Global Governance of Disaster Risk Reduction: an Introduction to a New Analytical Framework. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 10(1), 17–27. <https://doi.org/10.7454/global.v10i1.271>
- Met Office Hadley Center & World Food Programme. (2020). *Food Insecurity & Climate Change*. <https://www.metoffice.gov.uk/food-insecurity-index/>
- Namibia Ministry of Education, & World Food Programme. (2012). *The Namibian School Feeding Programme Transition Case Study*.
- Nickanor, N. M., & Kazembe, L. N. (2015). *Climate Change and Food Security in Namibia*.
- O'Brien, C. (2020). *10 Things You Wish You'd Always Known about Shock-Responsive Social Protection*.
- Pendleton, W., Crush, J., & Nickanor, N. (2014). Migrant Windhoek: Rural–Urban Migration and Food Security in Namibia. *Urban Forum*, 25, 191–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s12132-014-9220-x>
- Republic of Namibia. (2017). *Namibia: Zero Hunger Strategic Review Report*.
- Weiss, T. G. (2016). Humanitarian Action. In J. K. Cogan, I. Hurd, & I. Johnstone (Eds.), *The Oxford Handbook of International Organizations* (pp. 303–322).

- Oxford University Press.
- World Food Programme. (n.d.-a). *Namibia*. Diambil January 16, 2021, dari <https://www.wfp.org/countries/namibia>
- World Food Programme. (n.d.-b). *Strengthening Food Assistance Programmes in Namibia: An Information Note*.
- World Food Programme. (2016). *Standard Project Report 2016: EP-RBJ-Regional El Nino Preparedness for Southern Africa*.
- World Food Programme. (2019a). *Namibia Annual Country Report 2019: Country Strategic Plan 2017 – 2022*.
- World Food Programme. (2019b). *WFP Namibia: Country Brief*. <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000105877.pdf>.
- World Food Programme. (2020). *Decentralized Evaluation: Evaluation of Namibia National School Feeding Programme 2012-2018 (Evaluation Report Volume 1)*. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119629/download/?_ga=2.195013480.450402018.1646213985-568511979.1646213985.
- World Food Programme. (2020b). *Decentralized Evaluation: Evaluation of Namibia National School Feeding Programme 2012-2018 (Volume 2 Annexes)*. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000119630/download/?_ga=2.224330462.450402018.1646213985-568511979.1646213985.
- World Food Programme. (2020). *Social protection and safety nets*.
- World Food Programme. (2021). *Climate Change in Southern Africa*. A Position Paper for the World Food Programme in the Region. 1-31.
- World Food Programme, & Namibia Office of the Prime Minister. (2014). *Food Security Trends & Vulnerability*.
- Young, H. R., Shepherd, T. G., Acidri, J., Cornforth, R. J., Petty, C., Seaman, J., & Todman, L. C. (2020). Storylines for Decision-Making: Climate and Food Security in Namibia. *Climate and Development*, 13(6), 515–528. <https://doi.org/10.1080/17565529.2020.1808438>